

**AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
MELAUAI KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI,
SISTEM PELAPORAN DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH
(Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka)**

Hani Sri Mulyani^{1*}, Raden Wulan Saparinda², Cantika Septianita³, Arif Budiharjo⁴

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Majalengka

⁴ Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) ADIAS Pemalang

*E-mail: hanisrimulyani@unma.ac.id

Submitted: 9 December 2026	Accepted : 21 January 2026	Published: 02 February 2026
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hasil evaluasi SAKIP dan audit menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pengelolaan anggaran, sehingga akuntabilitas kinerja terus menjadi isu strategis seiring meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan studi pada Pemerintah Kabupaten Majalengka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka. Sedangkan Sampel merupakan 27 organisasi perangkat daerah Kabupaten Majalengka. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penyebaran 108 kuesioner berbentuk fisik kepada organisasi pemerintah daerah, yang diisi dan Kembali berjumlah 76 dari 27 organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung variabel pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan lebih besar dari nilai ttabel. Variabel pengendalian akuntansi memiliki nilai thitung $3,057 > ttabel\ 1,99346$ dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,005$ dan variabel sistem pelaporan memiliki nilai thitung $2,612 > ttabel\ 1,99346$ dengan nilai signifikansi $0,011 < 0,05$. Sedangkan kejelasan sasaran anggaran dan penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Kata kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

Accountability is a fundamental principle in the implementation of good governance. Evaluations of SAKIP and audit findings indicate persistent weaknesses in budget management, thereby making performance accountability a strategic issue amid growing public demands for transparent and responsible public services. This study aims to analyze the influence of budget goal clarity, accounting control, reporting systems, and the implementation of government accounting standards on the performance accountability of local governments, with a case study on the Government of Majalengka Regency. The research employed a quantitative approach using a survey method. The population of this study is the Government of Majalengka Regency, while the sample consists of 27 regional government organizations. The sampling technique used was purposive sampling. The primary data were obtained

directly through physical questionnaires distributed to regional government organizations, which were completed by 76 respondents from 27 regional government organizations within the Majalengka Regency Government. Data analysis was conducted using multiple linear regression. The results of the study indicate that accounting control and reporting systems have an effect on government performance accountability. This is evidenced by the t-value of the accounting control and reporting system variables, which are greater than the t-table value. The accounting control variable has a t-value of 3.057 > t-table 1.99346 with a significance value of 0.003 < 0.05, and the reporting system variable has a t-value of 2.612 > t-table 1.99346 with a significance value of 0.011 < 0.05. In contrast, budget goal clarity and the implementation of government accounting standards do not affect government performance accountability.

Keywords: Budget Target Clarity, Accounting Control, Reporting System, Government Accounting Standards, Performance Accountability, Local Government

PENDAHULUAN

Dalam era reformasi birokrasi dan desentralisasi fiskal, isu akuntabilitas kinerja publik menjadi sorotan utama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi hasil. Akuntabilitas kinerja dipandang sebagai komitmen organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta capaian program secara terbuka kepada masyarakat. Tuntutan ini semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran publik terhadap efisiensi penggunaan anggaran dan efektivitas pelayanan pemerintah. Namun, meskipun berbagai kebijakan reformasi telah diterapkan, akuntabilitas kinerja pemerintah di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa lemahnya orientasi pada hasil, rendahnya kualitas laporan kinerja, serta belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran (Loppies et al., 2023).

Secara normatif, kerangka hukum akuntabilitas telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian dan Pelaporan Kinerja. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pelaporan kinerja bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi instrumen strategis dalam pengendalian pembangunan dan peningkatan kepercayaan publik. Namun, data evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih berada pada predikat "B", yang menandakan adanya kesenjangan antara realisasi kinerja dengan pemanfaatan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip result-based management belum sepenuhnya tertanam dalam praktik birokrasi di daerah.

Secara teoritis, penelitian ini berpijak pada Stewardship Theory, yang menekankan bahwa aparatur publik bertindak sebagai pengelola (steward) yang berkewajiban melayani kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Teori ini mengasumsikan hubungan berbasis kepercayaan antara pemerintah dan publik, di mana kejujuran, tanggung jawab, serta integritas menjadi fondasi utama dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks ini, akuntabilitas bukan hanya bentuk pelaporan formal, melainkan refleksi moral atas sejauh mana pemerintah menjalankan amanah publik secara etis dan efisien. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 memperkuat perspektif ini dengan menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur dan periodik di hadapan masyarakat.

Fenomena khusus dapat dilihat pada Pemerintah Kabupaten Majalengka. Dalam lima tahun terakhir, daerah ini menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan predikat "B" pada hasil evaluasi SAKIP dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh

tahun berturut-turut (Cakrawala Media, 2024). Capaian ini menandakan adanya komitmen terhadap transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik. Namun, di sisi lain, temuan audit menunjukkan masih adanya kelemahan dalam implementasi akuntabilitas, seperti kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebesar Rp2,1 miliar, denda keterlambatan yang belum tertagih sebesar Rp146 juta, serta defisit anggaran sebesar Rp44 juta (Ahmad & Rizal, 2024). Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara keberhasilan formal dalam penilaian SAKIP dan efektivitas riil dalam pengelolaan kinerja. Komariyah (2020) memperingatkan bahwa jika kondisi tersebut tidak segera dibenahi, potensi penyimpangan keuangan dapat meningkat dan menurunkan kredibilitas pemerintah daerah di mata publik.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja tidak hanya bergantung pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada efektivitas faktor-faktor internal organisasi seperti kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan penerapan standar akuntansi pemerintah. Indriyani (2024) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, sementara penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak konsisten (Nur Ariyandi et al., 2023; Helin Gustri Mulya, 2022). Ketidaksamaan hasil empiris tersebut menandakan adanya research gap yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Berdasarkan fenomena nasional dan kondisi spesifik di Kabupaten Majalengka, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif untuk menggambarkan serta menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur hubungan antarvariabel melalui data numerik dan analisis statistik (Sugiyono, 2019). Data diperoleh dari kuesioner berbasis skala Likert lima poin yang disebarkan kepada responden sesuai indikator teoritis (Sekaran & Bougie, 2020). Instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan keandalan data. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 25, didahului oleh uji asumsi klasik agar model memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (Ghozali, 2021).

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Menurut sugiyono (2017:2) variabel adalah atribut atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan ditetapkan peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulan. Penelitian ini menganalisis tujuh variabel, yaitu enam variabel independen dan satu variabel dependen, sebagaimana dijelaskan berikut.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran secara transparan serta terukur kepada publik (Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014; Loppies et al., 2023). Akuntabilitas diukur berdasarkan aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja sesuai sistem SAKIP.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan sejauh mana tujuan anggaran dirumuskan secara jelas, spesifik, dan terukur agar mudah dipahami oleh pelaksana serta memudahkan proses

evaluasi kinerja (Indriyani, 2024). Kejelasan sasaran anggaran yang baik meningkatkan kemampuan organisasi dalam mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi didefinisikan sebagai sistem, prosedur, dan dokumentasi yang digunakan untuk menjaga keamanan aset, memastikan keandalan pencatatan transaksi keuangan, serta mencegah terjadinya penyimpangan (Pancaningrum, 2021). Mekanisme ini berperan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah.

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan mekanisme penyampaian informasi terkait pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada pihak internal maupun eksternal (Ningsih et al., 2022). Sistem pelaporan yang efektif mencerminkan tanggung jawab lembaga dalam mengkomunikasikan hasil kinerja secara objektif, transparan, dan terukur.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan standar akuntansi pemerintah adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat diaudit (Noormansyah & Arkeda Sirkomba, 2022). Penerapan standar ini memastikan konsistensi penyajian informasi keuangan serta memperkuat sistem akuntabilitas publik.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, yang terdiri dari dinas, badan, dan sekretariat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan kinerja. Populasi ini dipilih karena secara langsung terlibat dalam implementasi akuntabilitas kinerja dan penerapan standar akuntansi pemerintahan.

Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap paling memahami variabel yang diteliti. Kriteria yang digunakan adalah pegawai yang memiliki tanggung jawab dalam bidang keuangan, akuntansi, dan pelaporan kinerja, seperti kepala OPD, kepala bagian keuangan, serta staf akuntansi. Dari 27 OPD yang memenuhi kriteria, masing-masing diambil empat responden yang terdiri dari satu pejabat struktural dan tiga staf pelaksana bidang keuangan, sehingga total sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 108 responden. Namun jumlah kuesioner yang kembali hanya 76 dan jumlah tersebut dianggap representatif untuk menggambarkan kondisi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Majalengka secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian tanpa melakukan generalisasi. Menurut Sugiyono (2018:58), analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data sebagaimana adanya melalui penyajian nilai minimum, maksimum, dan rata-rata (*mean*). Pada penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan terhadap variabel akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Kejelasan sasaran anggaran (X1), pengendalian akuntansi (X2), sistem pelaporan (X3), dan penerapan standar akuntansi pemerintah (X4). Pengolahan data dilakukan menggunakan software SPSS versi 25.

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
Akuntabilitas kinerja pemerintah (Y)	76	312	331	324
Kejelasan sasaran anggaran (X1)	76	322	345	334
Pengendalian akuntansi (X2)	76	247	344	318
Sistem pelaporan (X3)	76	323	348	335
Penerapan standar akuntansi pemerintah (X4)	75	317	345	328

Sumber: *Output SPSS 25.0*, diolah sendiri, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, diperoleh gambaran bahwa responden memberikan penilaian yang sangat positif terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Majalengka. Variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) menunjukkan nilai rata-rata 334,75 dengan skor minimum 322 dan maksimum 345, yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penetapan anggaran telah dilakukan secara jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh seluruh pelaksana. Sementara itu, variabel pengendalian akuntansi (X_2) memiliki nilai rata-rata 318 dengan rentang skor 247–344, yang dikategorikan tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dan pencatatan akuntansi telah dijalankan secara efektif meskipun masih memerlukan peningkatan dalam hal evaluasi berkelanjutan. Adapun sistem pelaporan (X_3) mencatat rata-rata 335 dengan skor minimum 323 dan maksimum 348 yang tergolong sangat tinggi, mencerminkan bahwa proses pelaporan keuangan telah dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan mendukung transparansi informasi publik.

Selanjutnya, variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X_4) memperoleh nilai rata-rata sebesar 328 dengan skor minimum 317 dan maksimum 345, termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menegaskan bahwa penerapan prinsip akuntansi berbasis akrual telah diimplementasikan secara konsisten sesuai ketentuan SAP, sehingga meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel akuntabilitas kinerja pemerintah (Y) memiliki nilai rata-rata 324 dengan skor minimum 312 dan maksimum 331 yang juga termasuk kategori sangat tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah telah berjalan secara terbuka, terukur, dan sesuai dengan prinsip good governance. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Majalengka telah dilaksanakan dengan sangat baik, ditopang oleh kejelasan sasaran, efektivitas pengendalian akuntansi, ketepatan sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku..

Analisis Verifikatif

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual pada model regresi berdistribusi normal. Asumsi ini penting agar hasil analisis regresi dapat diinterpretasikan secara valid. Pengujian dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 25 dengan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S). Berdasarkan hasil uji, diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,092 dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,183, yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, data dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal, sehingga memenuhi asumsi klasik untuk analisis regresi linier.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.56057467
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.059
	Negative	-.092
Test Statistic		.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.183 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: *Output SPSS 25.0*, data diolah sendiri, 2025

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan tidak adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), di mana model dikatakan bebas multikolinearitas jika Tolerance > 0.1 dan VIF < 10. Seperti pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kejelasan sasaran anggaran	.489	2.009
	Pengendalian akuntansi	.433	2.311
	Sistem pelaporan	.243	4.107
	Penerapan standar akuntansi pemerintah	.321	3.116

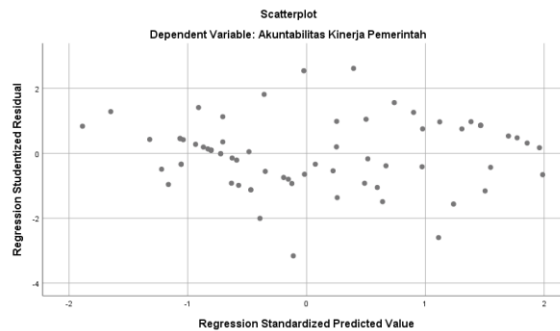
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sumber: *Output SPSS 25.0*, data diolah sendiri, 2025

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.18, diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel yaitu: Kejelasan Sasaran Anggaran sebesar 2,009, Pengendalian Akuntansi sebesar 2,311, Sistem Pelaporan sebesar 4,107, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 3,116. Seluruh nilai VIF tersebut berada di bawah 10, sedangkan nilai Tolerance masing-masing variabel juga lebih besar dari 0,10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi, sehingga model yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik terkait bebas multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dapat disebut homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini dapat melihat pola gambar scatterplot.



Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan pada variabel independen memengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, metode tersebut diterapkan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Hasil analisis disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.088	3.910		.022	.982
Kejelasan Sasaran Anggaran	.095	.139	.067	.685	.496
Pengendalian Akuntansi	.464	.152	.322	3.057	.003
Sistem Pelaporan	.553	.212	.367	2.612	.011
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	.175	.145	.147	1.203	.233

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sumber: Output SPSS 25.0, data diolah sendiri, 2025

Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,088 + 0,095 X_1 + 0,464 X_2 + 0,553 X_3 + 0,174 X_4 + e$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki koefisien regresi bertanda positif. Artinya, peningkatan pada masing-masing variabel kejelasan sasaran anggaran (0,095), pengendalian akuntansi (0,464), sistem pelaporan (0,553), dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (0,175) akan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan asumsi variabel lainnya berada dalam kondisi konstan. Sementara nilai konstanta sebesar 0,088 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka akuntabilitas kinerja pemerintah tetap berada pada nilai dasar tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas berkontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Uji Hipotesis

Analisis Koefisien Determinasi

Analisis determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah secara simultan memengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.811 ^a	.658	.639	2.632

a. Predictors: (Constant), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Akuntansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan

Sumber: *Output SPSS 25.0*, data diolah sendiri, 2025

Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan pada Tabel 6, diperoleh nilai R sebesar 0,811 dengan R Square sebesar 0,658. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keempat variabel independen memberikan kontribusi sebesar 65,77% terhadap perubahan akuntabilitas kinerja pemerintah, sedangkan sisanya 34,23% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang kuat terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, terhadap variabel dependen akuntabilitas kinerja pemerintah secara parsial dengan tingkat signifikansi 5%.

Tabel 7
Hasil Uji Parsial (uji t)

Coefficients ^a				
Model		t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.
1	(Constant)	.022	1,99346	.982
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.685	1,99346	.496
	Pengendalian Akuntansi	3.057	1,99346	.003
	Sistem Pelaporan	2.612	1,99346	.011
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	1.203	1,99346	.233

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sumber: *output spss 25.0*, data diolah sendiri, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 25 (Tabel 7), diketahui bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai t_{hitung} 0,685 < t_{tabel} 1,99346 dengan Sig. 0,496 > 0,05, sehingga dinyatakan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Selanjutnya, pengendalian akuntansi menunjukkan nilai t_{hitung} 3,057 > t_{tabel} 1,99346 dan Sig. 0,003 < 0,05, yang berarti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Sementara itu, variabel sistem pelaporan memiliki nilai t_{hitung} 2,612 > t_{tabel} 1,99346 dengan Sig. 0,011 < 0,05, menandakan adanya pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintah memperoleh t_{hitung} 1,203 < t_{tabel} 1,99346 dan Sig.

0,233 > 0,05, sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari keempat variabel yang diuji, hanya pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Hasil analisis menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah, dibuktikan dengan nilai thitung 0,685 < ttabel 1,99346 dan signifikansi 0,496 > 0,05. Artinya, tingkat kejelasan dalam penyusunan sasaran anggaran belum mampu meningkatkan akuntabilitas secara langsung. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Nur Ariyandani et al. (2023) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran sering kali hanya bersifat administratif dan belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pelaksanaan program akibat pemahaman terhadap outcome anggaran yang belum merata. Hasil ini juga tidak sejalan dengan teori *stewardship*, yang menekankan bahwa semakin jelas tujuan organisasi, semakin tinggi pula tanggung jawab aparatur dalam mencapai hasil yang transparan dan sesuai target (Donaldson & Davis, 1989–1991). Meskipun responden menilai bahwa proses perencanaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah telah disusun dengan baik dan memiliki sasaran yang jelas, hasil analisis menunjukkan bahwa kejelasan tersebut belum berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja, karena masih terbatas pada aspek perencanaan dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pelaksanaan. Hal ini disebabkan karena berdasarkan tanggapan responden terdapat pernyataan yang memiliki nilai dibawah rata-rata diantaranya ada batas waktu yang ditentukan untuk setiap program kerja, anggaran dibuat sesuai dengan skala prioritas dan dapat mengetahui secara jelas outcome yang dapat dicapai dalam setiap program kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang telah dibuat untuk program kerja tidak memiliki batas waktu pencapaiannya, anggaran yang dibuat tidak didasarkan pada skala prioritas dan tidak mengetahui secara jelas outcome yang ingin dicapai dari setiap program kerja, sehingga anggaran yang dibuat tidak mampu menjadi pedoman dalam pencapaian kinerja. Selain itu berdasarkan karakteristik responden sebanyak 32 responden (42%) dari total 76 responden memiliki masa kerja dibawah 5 tahun, hal ini menjadi kendala implementasi pelaksanaan serta minimnya pengalaman kerja.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis, pengendalian akuntansi terbukti berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka, ditunjukkan oleh nilai thitung 3,057 > ttabel 1,99346 dengan signifikansi 0,003 < 0,05. Artinya, semakin baik penerapan pengendalian akuntansi, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Indriyani (2024) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas melalui keandalan informasi keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas penggunaan anggaran. Sistem pengendalian yang kuat memungkinkan setiap aktivitas keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Hasil ini juga konsisten dengan teori *stewardship*, yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian akuntansi mendorong pegawai untuk bertindak etis dan profesional sebagai bentuk komitmen moral terhadap pertanggungjawaban publik (Bentzen, 2020). Dengan demikian, pengendalian akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Adapun hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi di lingkungan pemerintah daerah sudah tergolong baik, meskipun masih perlu ditingkatkan dalam aspek evaluasi dan pemanfaatan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih sistematis.

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis, sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka, ditunjukkan oleh nilai $t_{hitung} 2,612 > t_{tabel} 1,99346$ dan signifikansi $0,011 < 0,05$. Artinya, semakin baik penerapan sistem pelaporan, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Azizah Rahman dan Marwah Yusuf (2021) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berperan penting dalam menyajikan informasi kinerja yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi kinerja serta bentuk pertanggungjawaban formal kepada publik dan pemangku kepentingan. Hasil ini juga sejalan dengan teori *stewardship*, yang menjelaskan bahwa aparatur dengan komitmen intrinsik akan secara sukarela menyampaikan informasi kinerja secara akurat dan bertanggung jawab sebagai wujud akuntabilitas moral maupun profesional (Davis et al., 1997). Dengan demikian, sistem pelaporan yang baik dapat memperkuat transparansi, kepercayaan publik, serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Berdasarkan tanggapan responden, penerapan sistem pelaporan di lingkungan pemerintah daerah telah berjalan dengan sangat baik, terutama dalam aspek kejelasan informasi, ketepatan pencatatan, dan keteraturan pelaporan, yang mencerminkan praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel..

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka, yang ditunjukkan oleh nilai $t_{hitung} 1,203 < t_{tabel} 1,99346$ dan signifikansi $0,233 > 0,05$. Artinya, penerapan SAP belum mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja secara langsung. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sutrisno dan Astuti (2024) yang menyatakan bahwa penerapan SAP sering kali hanya bersifat administratif dan belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kinerja, sehingga tidak berdampak nyata terhadap peningkatan akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti efektivitas sistem pengendalian dan kualitas sistem pelaporan. Hasil ini juga tidak sejalan dengan teori *stewardship*, yang menekankan bahwa pencapaian akuntabilitas bergantung pada integritas dan kompetensi pelaksana, bukan semata pada regulasi formal (Davis & Donaldson, 1997). Skor rendah pada aspek penerapan teknis, seperti pencatatan dan klasifikasi aset sesuai SAP, menunjukkan bahwa pemahaman terhadap standar tersebut belum optimal di tingkat pelaksana, sehingga implementasinya masih lemah. Walaupun hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa SAP telah diterapkan dengan cukup baik dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan, namun penerapan SAP belum dilaksanakan secara menyeluruh, hal tersebut dapat dilihat dari tanggapan responden yang memiliki skor dibawah rata-rata diantaranya bahwa aparatur pemerintah daerah belum mampu memahami dan menerapkan dalam pelaporan sisa anggaran yang sistematis, laporan operasional untuk setiap periode, pencatatan aset dengan tepat, pencatatan kewajiban, pencatatan koreksi kesalahan serta belum maksimal dalam mengimplementasikan penyusunan Laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan yang mencakup laporan keuangan dari semua

entitas akuntansi. Terbatasnya pemahaman dalam penerapan SAP tersebut menyebabkan penerapan SAP tidak mampu mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka. Meskipun sasaran anggaran telah dirumuskan dengan baik, masih terdapat keterbatasan pemahaman pelaksana terhadap *outcome* program kerja, sehingga sasaran yang ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya, pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, yang berarti sistem pengendalian yang baik mampu meningkatkan transparansi, integritas, serta keandalan informasi keuangan dalam mendukung akuntabilitas kinerja. Selain itu, sistem pelaporan juga berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka, karena pelaporan yang akurat dan transparan berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Sementara untuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun SAP telah diterapkan sesuai ketentuan, pemahaman teknis terkait pencatatan, penilaian, dan klasifikasi aset tetap masih perlu ditingkatkan agar penerapannya dapat berkontribusi optimal terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait. Pertama, kejelasan sasaran anggaran sudah tergolong sangat baik, namun masih terdapat kelemahan pada aspek pemahaman terhadap *outcome* program di setiap satuan kerja. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu memperkuat koordinasi antarunit serta menyelenggarakan pelatihan teknis agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang selaras dalam mencapai target anggaran. Kedua, meskipun pengendalian akuntansi berada pada kategori tinggi, hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kinerja dan perencanaan berikutnya. Pemerintah daerah disarankan untuk mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi agar hasil pengawasan dapat menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan. Ketiga, sistem pelaporan dinilai sangat baik, namun masih kurang responsif terhadap kebutuhan informasi khusus pengguna laporan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fleksibilitas format pelaporan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan. Keempat, penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga termasuk sangat baik, namun masih ditemukan kendala dalam pencatatan dan pengklasifikasian aset tetap. Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu memperkuat pembinaan serta memberikan pelatihan teknis mengenai pengelolaan aset agar penerapan SAP dapat berjalan konsisten sesuai ketentuan. Terakhir, penelitian ini memiliki keterbatasan karena waktu pengumpulan data yang singkat, penggunaan kuesioner sebagai satu-satunya instrumen, serta ruang lingkup variabel yang terbatas. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) serta memperluas objek kajian ke wilayah lain agar hasilnya lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyandani, N., Chalid, L., & Umar, N. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Tata Kelola*, 7(1), 19–27. <https://doi.org/10.52103/tatakelola.v7i1.69>
- Azizah Rahman, M. Y. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan. *YUME : Journal of Management*, 257-270.
- Baehaqi, A. I. (2024, 10 24). *Tribun Cirebon.com*. Retrieved 1 13, 2025, from <https://cirebon.tribunnews.com/2024/10/24/pemkab-majalengka-tekor-960-pekerjaan-pihak-ketiga-kelebihan-bayar-diselesaikan-pj-bupati>
- Bastian, I. (2010). *Sistem Informasi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bentzen, J. T. (2020). Does Stewardship Theory Provide a Viable Alternative to Control-Fixated Performance Management? *administrative sciences*, 86.
- Bentzen, T. O. (2021). Breaking the Vicious Circle of Escalating Control: Connecting Politicians and Public Employees through Stewardship. *Administrative Sciencis*, 63.
- BPK RI *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved 02 8, 2025, from <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>
- Diskominfo. (2024, 01 1). *Open Data Majalengka*. Retrieved 1 24, 2025, from <https://opendata.majalengkakab.go.id/organisasi?perPage=36>
- DJPb, R. (2023, 11 24). *Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan*. Retrieved 01 20, 2025, from [kemenkeu.go.id: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3185-undang-undang-hkpd-tahun-2022.html](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3185-undang-undang-hkpd-tahun-2022.html)
- Gusti Ayu Ari Andriani¹, N. W. A. E. W. (2021). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar*. 418–436.
- Helin Gustru Mulya, E. F. (2022). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi*. 4(1), 192–212.
- Hendrik Latif et. al. (2022). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal Publicuho*, Volume 5 N(1), 1367–1376. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.83>
- Huang, H. (2018). Retrieved 01 24, 2025, from Analisis Regresi Berganda: <https://www.globalstatistik.com/analisis-regresi-sederhana-inipenjelasan/>
- Imam Ghozali. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indra. (2023). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah kota tanjungpinang. *skripsi*.
- Indriyani, D. (2024). Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah*, 153, 138–153.L.I. (2020, 07 13).
- L.I. (2020, 07 13). *BPK RI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. Retrieved 02 8, 2025, from <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>
- LM, D. S. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Majalengka.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

- Media, C. (2024, 06 26). *Cakrawala Media*. Retrieved 12 2, 2024, from <https://cakrawalamedia.com/2024/06/26/bpk-ri-temukan-potensi-kerugian-negara-hingga-miliaran-rupiah/>
- Meila. (2019, 04 09). *Pengaruh Penganggaran, Realisasi Anggaran dan pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Retrieved from Repository Universitas Muhammadiyah Palembang: <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4261>
- Muhammad, A., Afdhal, N., & Rahayu, A. (2022). *Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah*. 5(2).
- Muhammad Sawir, M. s. (2017). *Konsep akuntabilitas publik*.
- Ningsih, S. W., Yusuf, M., & Andayani, T. D. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *The 16th University Research Colloquium 2022*, 863–880. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2392>
- Noormansyah, I., & Arkeda Sirkomba, H. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Asn, Dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 618–627.
- Nur Ariyandani, Lukman Chalid, N. A. U. (2023). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja*. 10, 35–43.
- Pancaningrum, I. G. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Pemanfaatan E-Sbn Ritel Online Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara (Japd)*, 3(1), 34–42.
- PANRB, M. (2024, 10 2). *panrb Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi*. Retrieved 02 8, 2025, from <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tren-kenaikan-sakitp-selama-10-tahun-menteri-panrb-korelasi-positif-akuntabilitas-kinerja-dengan-akselerasi-pembangunan-dan-pengentasan-kemiskinan>
- Prasetya, H. I. (2022, 02 17). *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*. Retrieved 01 20, 2025, from <https://www.djkn.kemenuke.go.id/artikel/baca/14742/Akuntabilitas-Penyelenggaraan-Lelang-Dalam-Pelayanan-Publik-Makna-Dan-Urgensi.html>
- Prof. Amir Imbaruddin, MDA, P. D. (2016). *Birokrasi Akuntabilitas Kinerja* (M. I. Patarai (Ed.); Cetakan 1).
- Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah, S. M. (2020). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Entitas Akuntansi*. Jakarta: Kencana.
- Rachman, F. A. (2024, 10 02). *Info Publik*. Retrieved 02 8, 2025, from Portal Berita Info Publik: <https://infopublik.id/kategori/1-dekade-jokowi/874777/hasil-evaluasi-sakip-2024-nilai-pemerintah-daerah-meningkat-dalam-10-tahun-terakhir>
- Ramasoyan, Pascalina Van Sweet Sesa, Kurniawan Patma, R. L. (2021). *Analysis of Human Resource Competency, Internal Control System, Quality Of Financial Statements and Application Of Governace Accounting Standarts To Accountability Of Performance Of Government Agencies In Pegunungan Bintang Regency*. *Journal Of Social Science*, 474–492.
- Rio Pratama, H. A. (2019, Februari). Pengaruh Pengendalian akuntansi, sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntanasi*, Vol. 1, No. 1.

- Samsiyah, R. D. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen). *SEIKO: Journal of Management & Business, Volume 6*(Issue 1), 784–791.
- Shella Gilby Sapulette, S.E., M. S. (2023). *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (E. Damayanti (Ed.); Cetakan Pe). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarja, J. (2024, 11 22). *Times Indonesia*. Retrieved 1 13, 2025, from <https://timesindonesia.co.id/politik/519135/karna-sobahi-janjikan-bantuan-modal-usaha-rp-10-juta-untuk-warga-majalengka-dan-ngantor-di-des>
- Sutrisno, S., & Astuti, I. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Siber Dan Sandi Negara. *Aliansi : Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 18*(2), 185–198. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v18i2.532>
- Tome, S., Yamin Noch, M., Pasolo, F., & Sonjaya, Y. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua Srijanti. *SEIKO : Journal of Management & Business, 6*(2), 217–237.
- Yuldi Mile, Muhammad Natsir, Tenripada, L. S. (2023). The Influence Of Reporting Systems, Clarity Of Budget Targets And Accounting Control On Performance Accountability Of Government Agencies. *Jurnal of Governance, Taxation and Auditing, 2017*, 286–296.
- Yuli Lestari Labangu, L. O. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 223-235.